

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMAN 1 Mauponggo
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas/Semester : X/Ganjil
Materi Pokok : Konsep Ilmu Ekonomi
Alokasi Waktu : 2 x 45 JP (Pertemuan 1)

A. Kompetensi Inti

- KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan **faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif** berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, sertamenerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator
3.1 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi.	3.1.1 Menjelaskan pengertian ilmu ekonomi 3.1.2 Menganalisis masalah ekonomi (Kelangkaan/scarcity dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas) 3.1.3 Mengidentifikasi pilihan (kebutuhan dan keinginan) dan skala prioritas
4.1 Mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan.	4.1.1 Menyajikan hasil identifikasi tentang konsep ilmu ekonomiberdasarkan data/informasi dari berbagai sumber belajar yang relevan

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui pendekatan saintifik dan TPACK dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* peserta didik dapat : Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan Pengertian ilmu ekonomi, Masalah ekonomi, Pilihan dan skala prioritas dengan benar dan tepat..

D. Materi Pembelajaran

- a. Pengertian ilmu ekonomi
- b. Masalah ekonomi (Kelangkaan/*scarcity* dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas)
- c. Pilihan (kebutuhan dan keinginan) dan skala prioritas

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Pendekatan : TPACK

Model : *Problem Based Learning*
 Metode : Studi literatur, Diskusi, tanya jawab, dan penugasan

F. Media Pembelajaran

Powerpoint, Video, LCD, Laptop

G. Sumber Belajar

Kinanti G. dan Nella N., 2016. Ekonomi Untuk SMA / MA Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial Kelas X Kurikulum 2013. Bandung: Yrama Widya.

Sari Dwi A., 2016. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, Surakarta, Mediatama.

Link video tentang kelangkaan. <https://www.youtube.com/watch?v=dRj7GuzNhbK>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kelangkaan/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kelangkaan>

H. Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan ke-1

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Guru mengucapkan salam ✓ Berdo'a bersama ✓ Menanyakan kabar dan memotivasi peserta didik , ✓ Absensi ✓ Menyampaikan pokok-pokok materi Menyampaikan tujuan pembelajaran ✓ Apersepsi: Guru memberikan apersepsi dari guru agar termotivasi dan semangat untuk mengikuti pelajaran dengan memutar video pembelajaran tentang Kelangkaan. https://www.youtube.com/watch?v=dRj7GuzNhbK <p>Pertanyaan apersepsi: Identifikasikan permasalahan yang muncul dari cuplikan video diatas !</p>	10 Menit
Inti	<p style="text-align: center;">Orientasi peserta didik terhadap masalah</p> <p>Peserta didik secara berkelompok (@ 5 orang) mendiskusikan kasus/artikel tentang Kelangkaan (<i>scarcity</i>) melalui tautan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ARTIKEL DISKUSI KELOMPOK 1. https://nasional.okezone.com/read/2020/06/06/337/2225644/fao-peringatan-ancaman-krisis-pangan-saat-pandemi-covid-19-ini-tanggapan-menteri-lhk?page=1 dan 2. ➤ ARTIKEL DISKUSI KELOMPOK 2 https://regional.inews.id/berita/kelangkaan-bbm-di-lembata-ntt-harga-eceran-tembus-rp50000 ➤ ARTIKEL DISKUSI KELOMPOK 3 https://www.antarnews.com/berita/2082026/kementan-beberkan-alasan-penyebab-kelangkaan-pupuk-subsidi ➤ ARTIKEL DISKUSI KELOMPOK 4 https://www.mongabay.co.id/2021/05/01/ntt-alami-krisis-air-bersih-apa-yang-harus-dilakukan/ 	60 Menit

	<p style="text-align: center;">Mengorganisasi peserta didik</p> <p>Guru membentuk diskusi kelompok kecil untuk belajar dengan menjelaskan secara rinci strategi untuk menyelesaikan masalah Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan serta menulis evaluasi dari artikel berita tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok</p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi dari sumber belajar (buku/internet) yang berkaitan dengan materi</p> <p>Peserta didik mengklasifikasikan dan menganalisis guna memecahkan masalah</p> <p style="text-align: center;">Mengembangkan dan menyajikan hasil</p> <p>Setiap kelompok mempresentasikan hasil laporannya</p> <p>Kelompok lain menanggapi.</p> <p style="text-align: center;">Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p>	
	<p>Guru dan peserta didik mengevaluasi apa yang telah didiskusikan pada aktivitas pembelajaran</p> <p>Guru memperkuat materi mengenai Konsep Ilmu Ekonomi.</p>	
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guru bersama peserta didik menyimpulkan bersama materi pembelajaran mengenai Konsep Ilmu Ekonomi. ➤ Peserta didik diberikan tugas mandiri dengan batasan waktu dan dibahas pada pertemuan selanjutnya ➤ Guru menutup pembelajaran dengan berdo'a bersama dan salam. 	20 Menit

I. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian Sikap : Observasi/pengamatan

Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis, lisan, penugasan

Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja/ Praktik, produk, Proyek, Portofolio

Batawa, Oktober 2021

Mengetahui :

Kepala SMAN 1 Mauponggo

Guru Mata Pelajaran



Aloisius Angi, S.S

NIP. 19741122 200701 1 013

Adnan Mejid, S.Pd

NIP.

Lampiran :
Artikel Diskusi Kelompok 1.

FAO Peringatkan Ancaman Krisis Pangan saat Pandemi Covid-19

TANGERANG SELATAN - Badan pangan dunia atau FAO memperingatkan seluruh dunia akan krisis pangan saat Pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia pun langsung melakukan refocusing anggaran untuk menghindarinya adanya masalah tersebut. “Ketika FAO memperingatkan dunia tentang kelangkaan pangan karena COVID-19, maka negara-negara berusaha mengembangkan lahan yang subur untuk tanaman pangan. Namun, praktik pertanian di zona ekologis yang rentan harus dikelola dengan baik ketika itu tidak dapat dihindari,” tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Oleh karena itu, tandas Menteri Siti, pendekatan dan pemenuhan syarat budidaya, syarat manajemen atau pengelolaan, dan syarat konservasi secara tepat menjadi langkah sangat penting untuk dipraktikkan dalam pembangunan pertanian secara berkelanjutan. “Ini bukan hal mudah, perlu dukungan yang komprehensif. Untuk itu Indonesia menyambut kerja sama yang lebih erat dan memastikan dengan memperhatikan masyarakat dalam hal kesehatan, pangan, dan ekonomi, sambil mengelola hutan dan bentang alam secara berkelanjutan menuju masa depan yang kita inginkan,” ungkap Menteri Siti.

Dalam kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada konteks tema diskusi “Global Landscape Forum 2020”, tetap melangkah bekerja melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum.

“Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya dan upaya terhindar dari ekosida (ecocide) dan di sisi lain mendorong prinsip keadilan restorative (restorative justice),” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit melalui video conference.

Sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Want – Green Recovery from COVID19 ini menyoroti peluang langkah-langkah stimulus ekonomi dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam, menjelaskan langkah-langkah prioritas untuk “building back better” dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan ekonomi berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.

Lebih lanjut, Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa upaya Indonesia untuk meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan upaya ini serta pembaruan masih terus dilakukan.

“Komitmen dan upaya kami bahkan lebih kuat dari sebelumnya, termasuk pengaturan carbon pricing yang sedang dalam godokan dan segera dibahas pada tingkat rapat kabinet,” katanya.

Penerimaan dari carbon akan identik dan selaras dengan langkah-langkah green economy yang dijalankan oleh suatu negara, sebagaimana ditegaskan Prof Esward Barbier.

Dalam mengakhiri pandangannya pada forum internasional bergengsi tersebut, Menteri Siti Nurbaya menyatakan, pandemi Covid-19 merupakan persoalan multi-facet dan perlu ditangani dengan penegasan orientasi pembangunan berkelanjutan, inklusif, seraya membangun kohesi sosial masyarakat dalam solidaritas global. Selain Menteri LHK, panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF ini adalah Inger Andersen, Executive Director of UNEP, Prof. Edward B. Barbier, Colorado State University, Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of UNCCD, Achim Steiner, Administrator of UNDP, Naoko Ishii, CEO and Chairperson of Global Environment Facility dan Yugratna Shrivastava dari UN Major Groups Youth Representative.

Profesor Edward Barbier dari Colorado State University pada sambutan pembukaan sesi menyatakan bahwa untuk solusi iklim berbasis alam di negara berkembang perlu diimplementasikan tiga kebijakan utama yang merupakan strategi jangka panjang yang meliputi: menghilangkan subsidi bahan bakar fosil dan meralokasikannya untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan, menghilangkan subsidi irigasi dan Merealokasikannya untuk meningkatkan sanitasi perkotaan dan penyediaan air minum, dan mengenakan pajak Karbon. Selanjutnya Achim Steiner dari UNDP menyatakan bahwa kita tidak dapat melangkah melakukan

transformasi.

Artikel Diskusi Kelompok 2

Kelangkaan BBM di Lembata NTT, Harga Eceran Tembus Rp50.000

Joni Nura · Kamis, 15 April 2021 - 13:05:00 WIB Warga Lembata harus antre berjam-jam demi mendapatkan BBM murah. Di tingkat eceran, harga BBM tembus Rp50.000 per liter. (Foto: MNC Portal/Joni Nura)

LEMBATA, iNews.id – Kelangkaan BBM terjadi di Lembata, NTT pascabencana Badai Seroja yang mengakibatkan banjir bandang dan longsor. Kelangkaan tersebut memicu naiknya harga di tingkat eceran yang mencapai Rp50.000 per liter, Kamis (15/4/2021). Meski mahal, warga rela antre di Agen Premium Minyak Solar (APMS) demi mendapatkan BBM. Pantauan di lokasi, antrean panjang kendaraan roda empat di APMS Jalan Trans Lembata mencapai 1 km., Warga Harus Antre sejak Malam di SPBU Warga pun rela menunggu hingga malam hari demi seliter BBM yang akan mereka pakai untuk operasional kendaraan. Warga Lembata, Yanus mengakui sangat sulit mendapatkan BBM. “Kami harus antri dari siang hingga malam karena stok BBM di APMS banyak yang habis,” katanya. Dia berharap pasokan BBM bisa cepat kembalikan normal agar aktivitas warga bisa berjalan seperti semula. Warga Lembata, Madiyah berharap pemerintah memberikan perhatian terkait masalah BBM di Lembata pascabencana. Pemerintah diharapkan bisa mengatur suplai dan distribusi BBM ke Kabupaten Lembata sehingga tidak terjadi kelangkaan dan harga tidak melonjak. “Saat ini kami kesulitan mendapatkan BBM. Kami harus antre dari malam supaya bisa mengisi bahan bakar. Kalau tidak, kami harus membayar sampai Rp50.000 per botol dari pedagang di pinggir jalan,” katanya. Warga juga khawatir kondisi ini masih berlangsung lama. Sementara warga saat ini juga masih kesulitan setelah terdampak banjir bandang belum lama ini. “Kami berharap kondisi ini tidak berlangsung lebih lama lagi, apalagi saat ini kami sudah kesulitan karena dampak banjir bandang,” kata warga lainnya.

Artikel ini telah tayang di regional.inews.id dengan judul " Kelangkaan BBM di Lembata NTT, Harga Eceran Tembus Rp50.000 ", Klik untuk baca: <https://regional.inews.id/berita/kelangkaan-bbm-di-lembata-ntt-harga-eceran-tembus-rp50000>.

Artikel Diskusi Kelompok 3.

Kementan beberkan alasan penyebab kelangkaan pupuk subsidi

Senin, 5 April 2021 16:00 WIB

Ilustrasi - Kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif/am.

Yang pertama memang ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 45 persen dari kebutuhan, jadi hanya 9 juta ton dari kebutuhan 23,23 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy mengungkapkan alasan penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani dikarenakan beberapa faktor mulai dari pasokan hingga penggunaan yang berlebihan.

"Yang pertama memang ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 45 persen dari kebutuhan, jadi hanya 9 juta ton dari kebutuhan 23,23 juta ton," kata Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI tentang pupuk bersubsidi dan Kartu Tani yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Menurutnya, pasokan yang tidak memenuhi seluruh kebutuhan secara nasional tersebut menyebabkan pupuk subsidi hanya bisa didapatkan oleh sebagian petani.

Sarwo juga mengungkapkan adanya pupuk subsidi yang dijual di pasaran sebagai pupuk nonsubsidi dengan harga yang tinggi. Disparitas harga pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi membuat oknum menjual pupuk bantuan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi.

Faktor lainnya, lanjut Sarwo, penyediaan pupuk bersubsidi tidak sepenuhnya sesuai dengan jadwal tanam para petani. Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia sebagai produsen dan distributor untuk meningkatkan sistem distribusi agar bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

Selain itu, penggunaan pupuk bersubsidi secara berlebihan oleh petani juga menyebabkan pasokan cepat habis dan menjadi langka. Sarwo mengemukakan bahwa petani cenderung menggunakan pupuk urea secara berlebihan agar dapat menghasilkan daun padi yang hijau. Namun sebenarnya, penggunaan pupuk urea yang terlalu banyak bisa merobohkan tanaman padi.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat dengar pendapat tersebut meminta kepada pemerintah untuk lebih gencar menyosialisasikan penggunaan pupuk bersubsidi dengan benar kepada petani. Dia berharap agar para penyuluh dapat digerakkan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan penggunaan pupuk bersubsidi kepada petani.

"Tolong bantu, berikan selebaran, brosur, petani gunakan pupuk per hektar sekian kilo, apabila digunakan terlalu banyak bisa merusak tanaman. Juga termasuk selebaran informasi di kios-kios (pupuk), berikan informasi penggunaan pupuk," kata Sudin.

Artikel Diskusi Kelompok 4.

NTT Alami Krisis Air Bersih. Apa yang Harus Dilakukan?

oleh Ebed de Rosary [Kupang] di 1 May 2021

Air bersih masih menjadi persoalan bagi kabupaten dan kota di Provinsi NTT akibat dari kerusakan ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Pemerintah juga tidak melindungi sumber-sumber mata air melalui peraturan daerah

Walhi NTT meminta agar pemerintah daerah harus melakukan kajian lingkungan menyeluruh atas wilayah-wilayah resapan atau penyimpan air di setiap daerah. Juga harus menindak tegas pihak-pihak swasta yang monopoli atau melakukan privatisasi sumber air yang berdampak pada ketersediaan air untuk rakyat

Data pada 2019 yang menyatakan 75 persen warga NTT memiliki akses terhadap sumber air yang berkelanjutan. Persentase ini hanya merujuk pada ketersediaan sumber air dan belum memenuhi hak dasar lain seperti standar layanan yang baik dengan adanya saluran pipa dan keterjangkauan harga air bagi penduduk.

Permasalahan air bersih di Kota Kupang telah lama dirasakan oleh masyarakat dan sampai sekarang belum juga mendapat penyelesaian serius. Berbagai faktor mempengaruhinya seperti debit sumber air baku yang menurun, peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk di perkotaan akibat urbanisasi serta buruknya kemampuan manajerial operator air minum.

Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu dinobatkan menjadi daerah yang kering dimana setiap tahun selalu dihantui gagal tanam akibat dari kerusakan kantong-kantong air atas ulah manusia.

Cadangan air tanah (CAT) pun semakin berkurang dan air layak konsumsi masih menjadi problem mendasar.

Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya aktivitas pertambangan, kerusakan hutan dan lingkungan hidup lain.

Hasil riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2016 menyebutkan dari 22 kabupaten Kota di NTT, hanya Kota Kupang dan Kabupaten Malaka yang tidak mengalami kekeringan.

"Jadi jelas sebagian besar kabupaten di NTT mengalami problem yang sama, yaitu krisis air," kata Umbu Tamu Ridi Djawamara, Kepala Divisi Hukum Walhi NTT kepada Mongabay Indonesia, awal April 2021.

Umbu Tamu menyebutkan bersamaan dengan krisis tersebut, tidak dapat disangkal kerusakan ekosistem hutan sebagai fungsi penyangga ekosistem makin hari makin mengkhawatirkan.

Bagaimana tidak, sebutnya, kebakaran hutan di NTT mendapatkan predikat dengan tingkat titik api tertinggi di Indonesia yang pada tahun 2019 yang mencapai 14.352 titik api dengan luas yang terbakar 328.722 ha.

Sejumlah warga membawa jerigen kosong untuk mengisi air bersih saat pembagian air bersih oleh pihak kepolisian di Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT, Sabtu (19/9/2020). Foto : Antara /Kornelis Kaha

Dia katakan, selain kerusakan lingkungan karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terjadi dampak lingkungan dari aktivitas 9 perusahaan tambang yang arealnya terindikasi berada pada kawasan hutan konservasi, dengan luas sekitar 16.457,88 ha.

"Terdapat 77 perusahaan tambang yang arealnya terindikasi berada pada kawasan hutan lindung dengan luas sekitar 55.949,51 hektare. Ada juga alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan monokultur tebu seperti di Sumba Timur," paparnya.

Pengelolaan Konvensional

Selain kerusakan ekosistem hutan, juga terjadi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) terbesar di Timor Barat, DAS Benanain, yang juga sungai terpanjang di Timor Barat. Umbu Tamu menjelaskan sebanyak 30 persen wilayahnya telah menjadi wilayah pertambangan dan terdapat 72 IUP yang mencakup wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Dia menyesalkan rata-rata pemerintah kabupaten di NTT masih melakukan pengelolaan sumber daya air dengan cara konvensional. Ia katakan tidak ada perencanaan jangka panjang berkaitan dengan ketersediaan air di masa yang akan datang. "Sumber-sumber mata air tidak dilindungi dengan kebijakan daerah. Masih belum menyebarnya pandangan dan tidak adanya regulasi bahwa wilayah Bentang Alam Karst (BAK) adalah zona prioritas yang harus dilindungi karena merupakan tempat cadangan air tanah permanen," ungkapnya. Umbu Tamu sebutkan pemerintah malah masih mengizinkan usaha pertambangan di wilayah-wilayah yang merupakan kawasan karst. Contoh kasus di Kampung Lengko Lolok dan Luwuk di Desa Satar Punda, Kabupaten Manggarai Timur. Dia mengakui banyak proyek pembangunan di daerah yang nota bene di wilayah tersebut memiliki potensi penyimpan air yang harusnya menjadi zona lindung tetapi tidak

dipertimbangkan dengan kebijakan yang melindungi.

Lembar Kerja Kelompok

MATERI : KONSEP DASAR EKONOMI (Kelangkaan / Scarcity)

KELOMPOK :

ANGGOTA :

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

1. Berdasarkan pengamatan di Artikel, kelangkaan apa yang terjadi ?

.....

.....

.....

.....

2. Berdasarkan pengamatan di Artikel, apa penyebab terjadinya kelangkaan tersebut ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Menurut pendapat kelompokmu bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut?

.....

.....

.....

.....

.....

.....